BAB I  
PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 15 ayat (1) memberi amanat kepada setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD sendiri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah kota Malang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RPJMD. Panduan penyusunan Perubahan Renstra PD ini berisi tentang mekanisme penyusunan, sistematika, tata cara penyajian, serta jadwal penyusunan.

RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah ini merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan RKA yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

* 1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020**tentang **Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**. Kepmendagri ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 [Permendagri Nomor 90 Tahun 2019](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2020/06/permendagri-90-2019.html" \t "_blank);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 ;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomoer 4 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan akedua atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 twntang Pajak Daerah
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Perayuranh Daerah Kota Malang Nomoer 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkantoran;
25. Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
    1. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk Peningkatan kinerja penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya, berkedudukan di bawah Walikota. Untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah agar :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Menjadi acuan kerja resmi bagi badan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya.
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
   1. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Malang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

* 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  2. Sumberdaya Perangkat Daerah
  3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup pada RPJMD
  5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

* 1. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah
     1. Tujuan Perangkat Daerah
     2. Sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

* 1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang No. 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya, dengan tugas melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

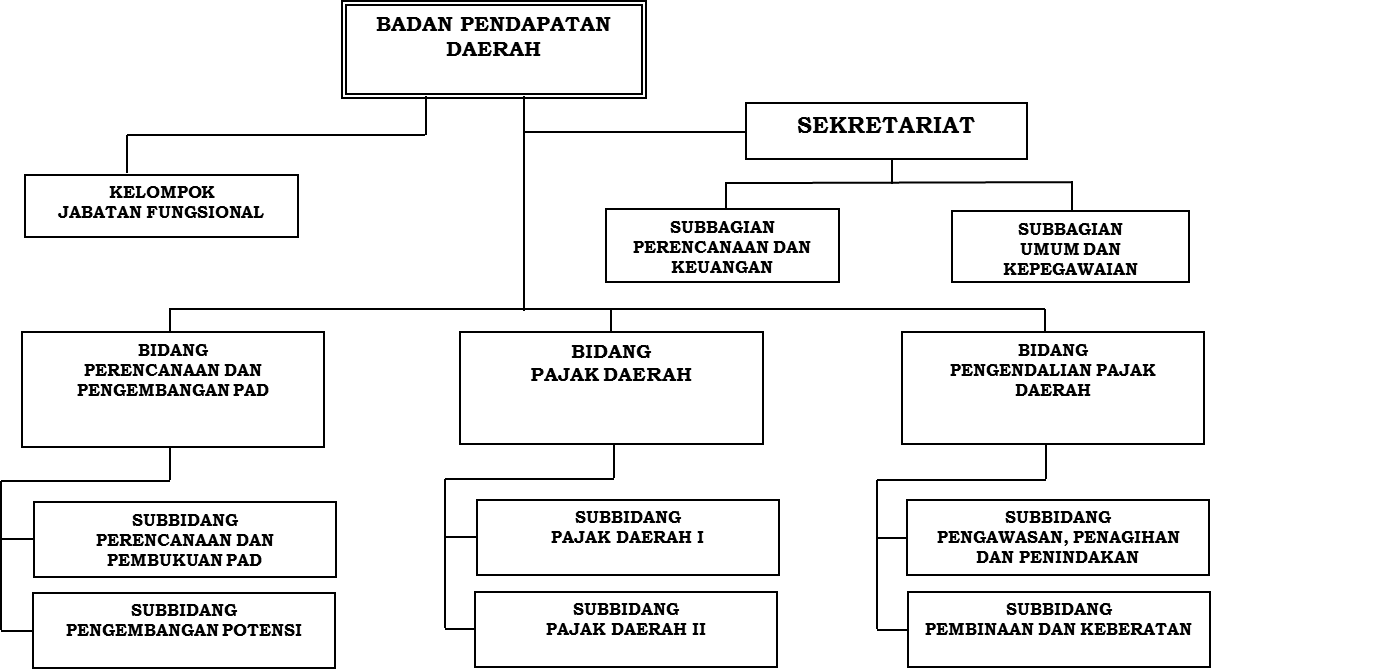
1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
2. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
3. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
4. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
5. pengoordinasian penerimaan PAD;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
7. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan lingkup pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
8. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
9. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
10. pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan asli daerah;
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan asli daerah; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pengelolaan PAD.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (Enam) orang Kepala sub bidang, 2 (dua) orang Kepala sub bagian, dan beberapa kelompok jabatan fungsional.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

* 1. Kepala Badan :
  2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, terdiri dari:
3. Subbidang Perencanaan dan Pembukuan PAD;
4. Subbidang Pengembangan Potensi;
   1. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari:
5. Subbidang Pajak Daerah I;
6. Subbidang Pajak Daerah II;
   1. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, terdiri dari:
7. Subbidang Pengawasan, Penagihan, dan Penindakan;
8. Subbidang Pembinaan dan Keberatan;
   1. Kelompok Jabatan Fungsional.



* 1. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumberdaya perangkat daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dilihat dari dua sisi yaitu kepegawaian dan perlengkapan kantor yang akan dijelaskan di bawah ini.

* + 1. Susunan Kepegawaian

Susunan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah sebanyak 174 orang, terdiri dari 98 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 76 orang tenaga penunjang operasional kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang menurut golongannya terbagi dalam diagram berikut:

Tabel 2.2.1

Pegawai ASN Tingkat Pendidikan Berdasar Gol/Ruang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | GOL/ | TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PER ORANG | | | | | | | | | JUMLAH |
| RUANG | S3 | S2 | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD |
| 1 | IV c | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | IV b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | IV a | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | III d | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | III c | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | III b | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | III a | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | II d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | II c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | II b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | II a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | I d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | I c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | I b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | I a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 |

Pegawai ASN Berdasar Jabatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOLONGAN | ESELON | | | | | PELAKSANA | TOTAL |
| I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.a |  |  | 3 | 5 |  |  | 8 |
| IV.b |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| IV.c |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| IV.d |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 12 |
| III.a |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| III.b |  |  |  |  |  | 19 | 19 |
| III.c |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| III.d |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| II.a |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| II.b |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| II.c |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| II.d |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.a |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| I.b |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| I.c |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| I.d |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Sumber : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Pebruari 2021

* + 1. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

| NAMA PERLENGKAPAN | JUMLAH | KONDISI |
| --- | --- | --- |
| Kantor (Gedung) | 400 M2 | Baik |
| Kendaraan   * Sepeda Motor * Mobil | 45 unit  14 unit | Baik  Baik |
| Elektronik   * Komputer * Laptop * Server * Printer * Meteran air * Videotron * Air Conditioner * White board * UPS * Alat Penghancur Kertas * Handy talkie * Televisi * Distometer * Mesin antrian * CCTV * Telepon : * Hardisk external * Router * Kamera digital * Dispenser | 262 unit  69 Unit  5 unit  127 unit  136 unit  3 unit  44 unit  3 buah  110 unit  12 unit  27 unit  17 unit  11 buah  2 unit  5 unit  2 unit  14 buah  3 unit  45 buah  6 buah | Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik |
| Peralatan Penunjang pelayanan   * Meja Kerja * Tangga aluminium * Vertical blend * Tugu peringatan zona integrasi * Kursi kerja, kursi rapat,dan kursi tamu * Filling cabinet * Lemari * Papan | * 116 unit * 8 unit * 1 unit * 1 unit * 177 Unit * 64 unit * 87 unit * 16 unit | * Baik * Baik * Baik * Baik * Baik * Baik * Baik * Baik |

Sumber : Sub Bag Umum & Kepegawaian, April 2021

* 1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan perubahan nomenklatur dari Badan Pelayanan Pajak Daerah. Dengan berubahnya nomenklatur maka ada penambahan fungsi Perangkat Daerah (pengalihan dari Subbid Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Semula Badan Pelayanan Pajak Daerah hanya berfungsi sebagai pemungut, dengan perubahan yang ada maka selain sebagai pemungut Pajak Daerah juga berfungsi sebagai koordinator penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya, diantaranya:

* 1. Retribusi Daerah;
  2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan;
  3. Lain-lain PAD yang Sah.

Terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota malang, meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan

Jenis retribusi yang di koordinir yaitu:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi IMB
3. Retribusi Parkir di tepi jalan umum
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Terminal
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
9. Retribusi Pengolahan Limbah
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
12. Retribusi Pelayanan Pasar
13. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
14. Retribusi Izin Trayek
15. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Badan pendapatan Daerah maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Subbid Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi). Capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Malang disajikan dalam tabel 2.1 dan 2.2.

Target kenaikan Pajak Daerah mulai tahun 2013 hingga 2018 rerata sebesar 13,04%. Realisasi yang dicapai rerata 16,56% dengan kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 24,47% di tahun 2016. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni hanya sebesar 3,49%.

Penerimaan Pajak Daerah mulai 2013 hingga 2018 ditargetkan sebesar 100%. Sedangkan capaian penerimaan selalu di atas angka 100%. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp. 374.641.673.419,65 atau 124,47% dan terendah terjadi pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp. 434.644.647.163,94 atau 103,49%.

**Tabel 2.1.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2014-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE | | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE | | | | |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | %Peningkatan Pajak Daerah |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16.48% | 13.60% | 18.25% | 10.76% | 4.75% | 164.80% | 136.00% | 182.50% | 107.60% | 47.50% |
| 2 | %Peningkatan Wajib Pajak Daerah |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30.05% | 32.76% | 11.32% | 19.77% | 1.00% | 300.54% | 327.60% | 113.16% | 197.67% | 20.00% |
| 3 | %Penurunan tunggakan Pajak Daerah |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | -7.88% | -22.20% | 1.85% | -13.50% | -9.65% | -157.60% | -444.00% | 37.00% | -270.00% | -193.60% |
| 4 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat |  |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83.22 | 76.2 | 80.94 | 84.07 | 85.73 | 100.27% | 91.81% | 97.52% | 101.29% | 103.29% |

**Tabel 2.2.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO |  | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun ke-5 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Prosentase Proyeksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |  |  |  | - | 37.04% | 18.96% |  |  | - | -19.43% | -79.85% | - | - |  |
| 2 | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah |  |  |  | 80.54% | 82.08% | 82.97% |  |  | 87.34% | 74.21% | 85.68% | - | - |  |
| 3 | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah |  |  |  | 1.81% | 1.81% | 18.70% |  |  | 3.90% | -3.40% | 3.08% | - | - |  |
| 4 | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 25.65% | - | - |  |

Keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari beberapa indikator yang di tetapkan berdasarkan tugas dan fungsi, jika dilihat pada tabel 2.1 yang di sajikan bahwa target pada indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah selalu melampaui dari target yang ditetapkan setiap tahunnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya kerjasama Badan Pendapatan Daerah dengan berbagai pihak dengan membuat perjanjian kerjasama (MOU), peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, mengadakan kegiatan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Target yang sulit untuk terlampaui yaitu pada indikator nomor 3 (tiga) yaitu prosentase penurunan piutang pajak daerah dikarenakan berbagai faktor diantaranya jumlah piutang PBB yang semakin bertambah, data wajib pajak yang kurang valid.

**Tabel 2.3.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ...**

**Kota Malang Tahun 2014-2018**

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA -RATA PERTUMBUHAN | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| 2014 | 2015 | 20 16 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5,609,631,779 | 3,322,586,300 | 5,116,800,000 | 6,295,300,000 | - | 4,736,648,820 | 2,970,295,668 | 4,156,414,597 | 5,140,331,096 | - | 84% | 89% | 81% | 82% |  | (0.16) |  |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1,292,357,593 | 1,905,846,000 | 4,064,800,000 | 887,023,000 | - | 1,103,902,305 | 1,512,582,800 | 3,190,772,925 | 503,317,750 | - | 85% | 79% | 78% | 57% |  | (0.04) |  |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | - | - | 658,700,000 | - | - | - | - | 446,338,000 | - | 0% | 0% | 0% | 68% |  | - |  |
| Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan, capaian kinerja dan keuangan | 25,692,000 | 171,992,000 | 434,000,000 | 475,000,000 | - | 22,935,000 | 133,063,000 | 292,928,500 | 389,582,000 | - | 89% | 77% | 67% | 82% |  | 1.58 |  |
| Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 5,585,854,628 | 11,146,834,150 | 9,301,500,000 | - | - | 4,875,149,600 | 9,518,061,650 | 8,288,267,821 | - | - | 87% | 85% | 89% | 0% |  | (0.04) |  |
| Program Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu | 128,964,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | - | - | 126,604,000 | 93,997,000 | 75,065,000 | - | - | 98% | 94% | 94% | 0% |  | (0.36) |  |
| Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah | - |  | - | 3,228,861,800 | - | - |  | - | 2,770,897,100 | - | 0% | 0% | 0% | 86% |  | - |  |
| Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah | - | - | - | 1,337,650,000 | - | - | - | - | 775,647,500 | - | 0% | 0% | 0% | 58% |  | - |  |
| Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah | - | - | - | 3,617,465,200 | - | - | - | - | 3,041,599,400 | - | 0% | 0% | 0% | 84% |  | - |  |
| Program Optimalisasi Pelayanan UPT |  |  |  |  | 721.622.500 |  |  |  |  | 202.494.170 |  |  |  | 28.06 % |  |  |  |

**Tabel 2.4.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

**Kota Malang Tahun 2018-2023**

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RATA -RATA PERTUMBUHAN | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ANGGARAN | REALISASI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program pelayanan administrasi perkantoran | 3,261,559,650 |  |  |  |  | 3,049,809,269 |  |  |  |  | 94% |  |  |  |  |  |  |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 4,419,434,325 |  |  |  |  | 3,733,600,920 |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  |  |  |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 507,297,500 |  |  |  |  | 264,090,000 |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 694,892,000 |  |  |  |  | 495,779,500 |  |  |  |  | 71% |  |  |  |  |  |  |
| Program Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah | 6,452,618,825 |  |  |  |  | 5,122,666,650 |  |  |  |  | 79% |  |  |  |  |  |  |
| Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah | 2,689,080,000 |  |  |  |  | 2,088,830,500 |  |  |  |  | 78% |  |  |  |  |  |  |
| Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah | 2,741,351,900 |  |  |  |  | 2,636,869,800 |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  |  |  |
| Program Optimalisasi Pelayanan UPT | 721.622.500 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Program Pelayanan Kesekretariatan |  | 7,502,002,772.00 |  |  |  |  | 4,666,589,469.00 |  |  |  |  | 62% |  |  |  |  |  |
| Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah |  | 1,244,050,000.00 |  |  |  |  | 1,155,075,000.00 |  |  |  |  | 93% |  |  |  |  |  |
| Program Pelayanan Pajak Daerah |  | 3,914,183,000.00 |  |  |  |  | 3,339,500,400.00 |  |  |  |  | 85% |  |  |  |  |  |
| Program Pengendalian Pajak Daerah |  | 2,112,932,868.50 |  |  |  |  | 1,572,674,050.00 |  |  |  |  | 74% |  |  |  |  |  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 47,824,190,895.00 |  |  |  |  | 3,147,165,193.00 |  |  |  |  | 7% |  |  |  |  |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  |  | 8,856,184,800.00 |  |  |  |  | 1,450,020,000.00 |  |  |  |  | 16% |  |  |  |  |

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L, Perubahan Renstra PD Provinsi, hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

Program-program penunjang pencapaian tujuan dan sasaran mulai tahun 2013 hingga 2018 berubah menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku serta menyesuaikan dengan perubahan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 terdapat 4 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2014-2016 terdapat 5 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan program pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu. Pada Tahun 2017 terdapat 7 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, program penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah, dan program pengembangan potensi Pajak Daerah. Tahun 2018 terdapat 8 program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, program penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah, program pengembangan potensi Pajak Daerah dan program optimalisasi pelayanan UPT.

Program penunjang sasaran adalah peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, program penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah, dan program pengembangan potensi Pajak Daerah. Selebihnya adalah program kesekretariatan penunjang operasional.

Capaian program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2013 sebesar 85,10%. Pada tahun 2014 sebesar 85,02%, tahun 2015 mencapai 85,39%, dan tahun 2016 sebesar 89,11%.

* 1. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Layanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang meliputi:

### Faktor Internal

1. Kekuatan
   1. Tersedianya regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Umum;
   2. Tersedianya Peraturan Peraturan Walikota Malang No. 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.
   3. Sarana prasarana yang cukup memadai;
   4. Terciptanya kerja sama dengan berbagai institusi;
   5. Hubungan yang harmonis dengan para *stakeholders* yang dibingkai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Kelemahan
   1. Peraturan perundangan yang belum mengakomodir untuk optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
   2. Sinkronisasi regulasi yang masih kurang antar Organisasi Perangkat Daerah yang bersinggungan;
   3. Belum diterapkannya *reward and punishment*  sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memotivasi aparatur;
   4. Kurang terpadunya (integrasi) pengelolaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
   5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
   6. Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan yang dibutuhkan;
   7. Belum optimalnya aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

### Faktor Eksternal

1. Peluang
2. Kota Malang sebagai kota pendidikan sehingga berimplikasi pada tingkat hunian kost;
3. Kota Malang sebagai kota yang nyaman untuk persinggahan dan tempat tinggal sehingga banyak yang tertarik untuk berinvestasi rumah dan tanah;
4. Teknologi informasi yang semakin maju;
5. Banyaknya event hiburan;
6. Keberadaan forum komunikasi pada tiap-tiap *stakeholders* sebagai sarana komunikasi untuk peningkatan penerimaan PAD.
7. Tantangan
8. Penghindaran terhadap pajak masih cukup tinggi;
9. Penataan system manajemen pengelolaan salah satu obyek pendapatan asli daerah yang belum optimal;
10. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin menurun *pasca* kasus korupsi;
11. Masih dirancangnya perubahan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai organisasi publik yang mempunyai fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya, maka *output* yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap pemungutan Pajak Daerah dan mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Melihat potensi daerah yang ada, Badan Pendapatan Daerah perlu mengambil langkah konkrit dalam upaya mewujudkan visi Kota Malang yaitu “Kota Malang Bermartabat” yang mempunyai makna bahwa bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Sehingga diharapkan tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia bagi kota Malang dan seluruh masyarakatnya.

Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan gagalnya mencapai tujuan.

Adapun unsur-unsur kekuatan (strength) , kelemahan (Weaknes) , peluang (Opportunities) dan ancaman (Treats) hasil identifikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang antara lain :

ANALISA SWOT

Salah satu permasalahan pembangunan yang ada di Kota Malang ini adalah rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang dirasa masih perlu ditingkatkan sehingga berpengaruh pada keberlangsungan pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya adalah belum tergalinya potensi PAD secara optimal.

Daerah dikatakan mandiri secara fiscal manakala rasio PAD terhadap total pendapatan daerah lebih dari 50% (Abdul halim, 2007:234). Kondisi saat ini rasio PAD terhadap total pendapatan APBD mencapai 25%. Hal ini berarti masih jauh dari kategori mandiri. Berikut kami sajikan pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

| Kekuatan (Strength) | Kelemahan (Weakness) |
| --- | --- |
| * 1. Tersedianya regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Umum;   2. Tersedianya Peraturan Walikota Malang No. 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. ;   3. Sarana prasarana yang cukup memadai;   4. Terciptanya kerja sama dengan berbagai institusi;   5. Hubungan yang harmonis dengan para stakeholders yang dibingkai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). | 1. Peraturan perundangan yang belum mengakomodir untuk optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah; 2. Sinkronisasi regulasi yang masih kurang antar Organisasi Perangkat Daerah yang bersinggungan; 3. Belum diterapkannya *reward and punishment*  sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memotivasi aparatur; 4. Kurang terpadunya (integrasi) pengelolaan data dan informasi Pendapatan Daerah; 5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi; 6. Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan yang dibutuhkan; 7. Belum optimalnya aparatur dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threats) |
| * + - 1. Kota Malang sebagai kota pendidikan sehingga berimplikasi pada tingkat hunian kost;       2. Kota Malang sebagai kota yang nyaman untuk persinggahan dan tempat tinggal sehingga banyak yang tertarik untuk berinvestasi rumah dan tanah;       3. Teknologi informasi yang semakin maju;       4. Banyaknya event hiburan;       5. Keberadaan forum komunikasi pada tiap-tiap *stakeholders* sebagai sarana komunikasi untuk peningkatan penerimaan PAD. | * + 1. Penghindaran terhadap pajak masih cukup tinggi;     2. Penataan system manajemen pengelolaan salah satu obyek pendapatan asli daerah yang belum optimal;     3. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin menurun *pasca* kasus korupsi; |

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | MASALAH POKOK | | MASALAH | PENYEBAB MASALAH | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | AKAR MASALAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERNAL | EKSTERNAL |
| 1 | Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali secara optimal | Sistem manajemen pengelolaan PAD yang belum optimal | | 1. Peraturan perundangan yang belum mengakomodir untuk optimalisasi pemungutan PAD;  2. Sinkronisasi regulasi yang masih kurang antara OPD yang bersinggungan;  3. Belum diterapkannya reward dan punishment sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk memotivasi aparatur;  4. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah;  5. Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan yang dibutuhkan;  6. Penghindaran terhadap pajak daerah masih cukup tinggi;    7. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang menurun.  8.Banyaknya variabel yang mempengaruhi perencanaan menjadikan sebuah perencanaan ditetapkan berdasarkan asumsi. | 1 –    2. Kurangnya koordinasi dengan OPD yang bersinggungan;  3. Belum ada regulasi yang mengatur  4. Belum terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan pihak terkait.  5. Pengusulan SPMT jabatan pelaksana yang tidak sesuai kompetensi dan peta jabatan yang ada.  6. sosialisasi terhadap pemahaman pajak daerah yang kurang tepat sasaran.  7. –  8. Adanya kajian konsultan dan kebijakan pimpinan | Belum ada revisi Undang-Undang tentang PDRB;   1. Kurangnya koordinasi dengan OPD yang bersinggungan; 2. – 3. Belum adanya *interest program* dalam mendukung pembangunan sistem data dan informasi pengelolaan pendapatan daerah. 4. Pendistribusian personil jabatan pelaksana yang tidak sesuai kompetensi dan peta jabatan yang ada. 5. – 6. Terjadinya kasus korupsi yang menimpa eksekutif dan legislatif di kota malang. 7. Adanya Permendagri tentang penyusunan APBD | * + - 1. Regulasi yang ada (UU 28 tahun 2009) belum mengakomodir permasalahan perpajakan di daerah.       2. Belum terbangunnya sistem pengendalian Pajak Daerah dengan baik;       3. Sumberdaya aparatur kurang kompeten di bidangnya.  1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang belum optimal |
|
|

* 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2018-2023 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi pembangunan Kota Malang periode 2018-2023 adalah :

“Kota Malang BERMARTABAT ”

Visi tersebut mengandung maskud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah “kota bermartabat”, adalah sebuah profil Kota Malang yang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif. Dalam arti yang lebih luas adalah Kota yang aman dari segala bentuk ancaman, senantiasa tertib, terlihat bersih dan asri. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kota Malang yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki berbagai keunggulan dan daya saing tinggi untuk dapat menempatkan Diri sebagai kota yang terkemuka, prestasi di berbagai bidang. Visi “Kota Malang Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Malang tahun 2018-2023 tersebut di tempuh melalui 4 (empat) Misi diantaranya :

Misi 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas,

aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah bertumpu pada Misi 4 yaitu "Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel". Didalam misi keempat terdapat tujuan kota Malang yaitu “Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel”, dengan sasaran sebagai berikut :

* + - 1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum;
      2. Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif;
      3. Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN;
      4. Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi.

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebagai mana di jabarkan diatas, maka dukungan yang utama yang di berikan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel dengan meningkatkan kualitas sistem kelembagaan yang efektif. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan rancangan program untuk mendukung program pembangunan daerah yaitu :

1. Program Perencanaan dan pengembangan PAD;
2. Program Pelayanan Pajak Daerah;
3. Program Pengendalian Pajak Daerah; dan
4. Program Pelayanan Kesekretariatan.

Tabel 3.2

Telaah Visi,Misi dan Program KDH/WKDH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | VISI/MISI/PROGRAM KERJA KDH/WKDH | TUPOKSI PD | PERMASALAHAN | FAKTOR | |
| PENGHAMBAT | PENDORONG |
|  | Visi " Kota Malang Bermartabat" | | | | |
|  | Misi 4 Pemerintahan yang Tertib Hukum, Profesional dan Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Akuntabel | Penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya, berkedudukan di bawah Walikota |  |  |  |
|  | Program - program Badan Pendapatan Daerah Kota Malang | | | | |
| 1 | Program Perencanaan dan Pengembangan PAD |  | 1. Banyaknya variabel yang mempengaruhi perencanaan menjadikan sebuah perencanaan ditetapkan berdasarkan asumsi. 2. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah; | SDM yang kurang kompeten | 1. Adanya Permendagri tentang penyusunan APBD 2. Adanya audit sistem informasi |
| 2 | Program Pelayanan Pajak Daerah |  | Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang belum optimal | Belum optimalnya implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam program dan kegiatan | Adanya Perda dan Perwal perpajakan daerah |
| 3 | Program Pengendalian Pajak Daerah |  | Belum terbangunnya sistem pengendalian Pajak Daerah dengan baik | Belum ada kebijakan teknis terkait pengendalian Pajak Daerah | Pemanfaatan teknologi informasi |

* 1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Pelaksanaan pembangunan di Kota Malang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang saja, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholder* (para pemangku kepentingan) lainnya seperti unsur legislatif, Instansi vertikal, kalangan akademisi, para jurnalistik, serta dunia usaha yang juga berkewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra. Badan Pendapatan Daerah di dalam menyusun Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dapat selaras dengan apa yang hendak di capai oleh Pemerintah Kota Malang.

Tabel 3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | PERUBAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI | TUPOKSI PD | PERMASALAHAN | FAKTOR | |
| PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | Peningkatan Pendapatan dari PAD | Penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya, berkedudukan di bawah Walikota | Proyeksi pertumbuhan moderat | Dinamika kondisi eksternal | Regulasi dan koordinasi yang efektif dengan institusi terkait |
| 2 | Peningkatan Kualitas pelayanan Publik | Tingkat Kepatuhan Wajib pajak stagnan | Tingkat kesadaran masyarakat | Standarisasi prosedur layanan |
| Tuntutan masyarakat terhadap Pelayanan | Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur menurun | Standarisasi prosedur layanan |
| Tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan | Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur menurun | Pengembangan sistem pelayanan berbasis IT |

* 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia tidak terlepas dari resiko kerusakan lingkungan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat dampak pembangunan dan perekonomian. Oleh karenanya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pemerintah Kota Malang lebih menitik beratkan pada penguatan rumusan kebijakan rencana dan program yang diarahkan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan yang menjadi prioritas tertentu.

Adapun prioritas perhatian KLHS Pemerintah Kota Malang adalah kemacetan di berbagai ruas jalan dan wilayah Kota Malang, pentingnya Penataan drainase kota dan pemukiman, masih kurangnya Ruang Terbuka

Hijau (RTH) sebesar 30% sesuai amanat UU, sistem pengelolaan sampah yang terpadu, pelayanan kesehatan yang belum optimal, kualitas pendidikan yang belum merata, peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM dan ekonomi kreatif, penggalian/rebranding konsep pariwisata Kota Malang, sanitasi dan air bersih.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang melalui KLHS ini berupaya melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap resiko-resiko kerusakan lingkungan yang mulai dilakukan pada tahap tataran awal yang berupa kebijakan, rencana dan program yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang.

Tabe

l 3.4

Telaah RTRW dan KHLS pada RPJMD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KEBIJAKAN RT/RW/KLHS | TUPOKSI PD | PERMASALAHAN | FAKTOR | |
| PENGHAMBAT | PENDORONG |
| 1 | Rasio PAD terhadap PDB | Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya | Sistem manajemen pengelolaan PAD yang belum optimal | 1. SDM yang kurang kompeten;  2. Belum optimalnya implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam program dan kegiatan;  3. Belum ada kebijakan teknis terkait pengendalian Pajak Daerah | 1. Adanya regulasi tentang Perpajakan Daerah; 2. Pemanfaatan teknologi informasi |

* 1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota Malang tahun 2018-2023.

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah;
2. Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah;
3. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Walikota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kota Malang adalah:

“Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD”. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu :

* + - 1. Optimalisasi Penerimaan PAD
      2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN | KONDISI AWAL KINERJA | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
|
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD |  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,33 |
| Optimalisasi Penerimaan PAD | Persentase Capaian PAD | 114.00% | 105.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Meningkatnya  Kinerja Pelayanan  Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 84.38 | 84.87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaan arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada isu strategis yang diangkat. Hal ini disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1

Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAHUN I | TAHUN II | TAHUN III | TAHUN IV | TAHUN V |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD | 1. Optimalisasi  Penerimaan  PAD | Optimalisasi kualitas database potensi PAD | *Update database* secara intensif | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2. Meningkatnya  Kinerja  Pelayanan  Perangkat  Daerah | Penguatan SDM | Peningkatan kapasitas SDM aparatur | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Pengintegrasian Sistem Data dan Informasi PAD | - | √ | √ | - | - |
|  | Pengendalian sistem manajemen Pajak Daerah | 1. Mendekatkan layanan kepada masyarakat | - | √ | √ | √ | √ |
|  | 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 3. Penurunan piutang Pajak Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 4. Law enforcement terhadap regulasi perpajakan daerah | - | √ | √ | √ | √ |

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kota Malang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Malang.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program tahun 2018 – 2023 ini berupa :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. Peringatan/kegiatan isidentil;
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
14. Pengadaan BBM dan pelumas;
15. Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
16. Penyusunan laporan keuangan;
17. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
18. Pelaksanaan zona Intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM );
19. Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan;
20. Penyusunan Renstra ;
21. Penyusunan Dokumen RENJA/RKT;
22. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor;
23. Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor.
24. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Program ini merupakan kegiatan dalam menunjang capaian penerimaan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Program ini dilaksanakan setiap tahun selama tahun 2018 – 2023 yang meliputi kegiatan :

1. Perencanaan Dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah
2. Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
4. Program Pelayanan Pajak Daerah

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi pajak yang ada melalui kajian, sosialisasi sadar pajak, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan suatu aplikasi yang mampu mendukung system perpajakan daerah. Sehingga diharapkan melalui program ini dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
2. Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah I;
3. Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II;
4. Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II.
5. Program Pengendalian dan evaluasi Pendapatan daerah

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pelaporan pendapatan daerah, memperkecil tunggakan atas piutang pajak serta menyelesaikan sengketa/keberatan oleh wajib pajak atas penetapan pajaknya. yang meliputi kegiatan

sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah;
2. Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Penagihan Piutang Pajak Daerah;
4. Penyelesaian keberatan dan sengketa pajak Daerah;
5. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah.

Hasil Pemetaan Rencana, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

| TUJUAN | SASARAN | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome),Kegiatan (Output) | Data Capaian pada tahun awal perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | |
| 2017 | 2018 | Target | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD |  |  |  |  |  |  |  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 |  | 0,26 | |  | 0,28 | |  | 0,30 | |  | 0,33 | |  | 0,33 |  |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Nilai SAKIP | 84.38 | 84.87 | 83 |  | 83 | |  | 83 | |  | 83 | |  | 83 | |  | 83 |  |
|  | 5 | xx | 2 | 1 |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 100% | 2,777,839,700 | - | |  | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 284816 | 5,519 | 5000 surat | 201,673,350 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | 12 | 12 bulan | 12 bulan | 1,367,600,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 4 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 41 | 68 unit | 75 unit | 74,990,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 5 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional | 71 | 75 unit | 81 unit | 41,500,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 7 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah ruangan yang dibersihkan | 10 ruang | 10 ruang | 14 ruang | 132,588,800 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 8 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 62 Jenis | 66 jenis | 67 jenis | 132,656,950 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 9 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 16 Jenis | 16 jenis | 15 jenis | 95,692,500 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 13 Jenis | 14 Jenis | 10 jenis | 10,000,500 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 9 Jenis | 9 Jenis | 9 jenis | 46,787,600 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 14 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman | 80 kali | 27 Jenis | 120 kali | 90,150,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 13 kali | 15 Kali | 15 kali | 400,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 23 | Peringatan/kegiatan isidentil | Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 2 kali | 6 Kali | 2 kali | 32,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 1 | 35 | Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip | Hasil Digitasi Arsip Pajak Daerah | 90.000 arsip |  | 90.000 arsip | 152,200,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 3 | 02 | 3.02 | 02 |  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 100% | 2,725,826,125 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 2 | 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor | 20 jenis | 21 jenis | 20 jenis | 1,298,761,125 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 2 | 13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah luasan gedung kantor yang dipelihara | 850m2 | 1 gedung | 850m2 | 201,150,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 2 | 15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 78 kendaraan | 67 Kendaraan | 78 kendaraan | 676,950,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 2 | 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 9 jenis | 6 Jenis | 9 jenis | 199,790,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 2 | 35 | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume bbm | 23.670 liter | 16000 liter | 23.670 liter | 297,775,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan penilaian BMD | 1 dokumen | 0 | 1 dokumen | 51,400,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 5 |  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya | 75% |  | 75% | 494,797,500 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 5 | 8 | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan kapasitas Aparatur | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 494,797,500 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 6 |  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan | Penilaian LAKIP OPD oleh APIP | 83 | 83 | 83 | 690,212,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 6 | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun | 3 jenis dokumen | 3 | 5 jenis dokumen | 27,588,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 6 | 2 | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan yang tersusun | 12 jenis dokumen | 12 | 12 jenis dokumen | 268,124,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 6 | 5 | Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 1 dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen | 41,650,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 6 | 7 | Pelaksanaan zona Intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih melayani ( WBBM ) | Nilai hasil pelaksanaan Zona Integritas oleh APIP | 50 | 75 | 75,5 | 73,150,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | 5 | xx | 2 | 6 | 10 | Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan | Jumlah sertifikat ISO 9001 : 2015 yang terbit | 1 sertifikat | 1 sertifikat | 1 sertifikat | 100,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Renstra | Jumlah Dokumen Renstra | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen RENJA/RKT | Jumlah Dokumen RENJA/RKT | 2 Dokumen | 1 | 2 Dokumen | 82,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen RKA/DPA dan PRKA/DPPA | Jumlah Dokumen RKA/DPA dan PRKA/DPPA | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 27,700,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  | Optimalisasi Penerimaan PAD | x | 2 | 2 | 21 |  | Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah | Nilai Piutang yang tertagih | 23,164,254,828.80 |  | 28,000,000,000.00 | 1,686,000,000 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | x | 2 | 2 | 21 | 1 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah permasalahan yang diselesaikan |  | 848 | 1200 WP | 478,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 21 | 2 | Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD | 1.Jumlah WP yang tertagih | 2.085 Surat |  | 2.085 Wajib Pajak | 1,154,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Jumlah SKPD yang terdistribusi | 37267 SKPD |  | 37267 SKPD |  | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 21 | 3 | Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah | Jumlah sengketa/permasalahan/pengaduan yang diselesaikan | 900 sengketa/permasalahan/pengaduan |  | 900 sengketa/permasalahan/pengaduan | 54,000,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 22 |  | Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah | % kenaikan target |  |  | 19.21% | 1,162,111,900 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Kajian/analisa potensi pajak daerah | Jumlah dokumen kajian | 3 dokumen kajian |  | 16 dokumen kajian | 689,070,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Kajian pajak daerah | Jumlah dokumen kajian | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 22 | 2 | Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah | Nilai Penerimaan pajak hasil monitoring dan evaluasi | - | - 12 dokumen laporan hasil monitoring; - 2 dokumen laporan evaluasi penerimaan pajak daerah | 501,144,000,000 | 95,220,000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 22 | 3 | Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan daerah | Jumlah aplikasi sistem perpajakan daerah yang terintegrasi | - | 4 aplikasi | 2 aplikasi | 377,821,900 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 20 |  | Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah | % Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah Baru |  |  | 5% | 4,485,120,825.000 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 20 | 1 | Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah SKPD yang diterbitkan | - | 344,104 | 340.000 SKPD | 1,202,640,700.00 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 20 | 2 | Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah objek Pajak Daerah yang dipantau | - | 1,624 | 10000 OP | 785,938,325.00 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 20 | 3 | Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD | Jumlah NPWPD yang diterebitkan | - | 557 | 972 NPWPD | 136,521,800.00 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
|  |  | x | 2 | 2 | 22 | 1 | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak | % Jumlah WP Membayar Pajak | - | - | 71% | 2,360,020,000.00 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | - |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD |  |  |  |  |  |  |  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 |  | 0,26 | |  | 0,28 | |  | 0,30 | |  | 0,33 | |  | 0,33 |  |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  | Nilai SAKIP | 84.38 | 84.87 | 83 |  | 83 | |  | 83 | |  | 83 | |  | 83 | |  | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | - | - | - | - | 100% | | 7,000,000,000.00 | 100% | | 7,350,000,000.00 | 100% | | 7,717,500,000.00 | 100% | | 8,103,375,000.00 | 100% | 30,170,875,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | - | - | - | - | 5000 surat | | 213,370,000.00 | 5000 surat | | 234,707,000.00 | 5000 surat | | 258,177,700.00 | 5000 surat | | 283,995,470.00 | 5000 surat | 990,250,170.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | - | - | - | - | 12 bulan | | 1,395,660,000.00 | 12 bulan | | 1,535,226,000.00 | 12 bulan | | 1,688,748,600.00 | 12 bulan | | 1,857,623,460.00 | 12 bulan | 6,477,258,060.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | - | - | - | - | 75 unit | | 79,450,000.00 | 75 unit | | 87,395,000.00 | 75 unit | | 96,134,500.00 | 75 unit | | 105,747,950.00 | 75 unit | 368,727,450.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional | - | - | - | - | 81 unit | | 29,913,400.00 | 81 unit | | 32,904,740.00 | 81 unit | | 36,195,214.00 | 81 unit | | 39,814,735.40 | 81 unit | 138,828,089.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luas ruangan yang dibersihkan | - | - | - | - | 850 m2 | | 153,071,400.00 | 850 m2 | | 168,378,540.00 | 850 m2 | | 185,216,394.00 | 850 m2 | | 203,738,033.40 | 850 m2 | 710,404,367.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | - | - | - | - | 67 jenis | | 501,677,600.00 | 67 jenis | | 551,845,360.00 | 67 jenis | | 607,029,896.00 | 67 jenis | | 667,732,885.60 | 67 jenis | 2,328,285,741.60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | - | - | - | - | 15 jenis | | 105,995,000.00 | 15 jenis | | 116,594,500.00 | 15 jenis | | 128,253,950.00 | 15 jenis | | 141,079,345.00 | 15 jenis | 491,922,795.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | - | - | - | 10 jenis | | 4,526,000.00 | 10 jenis | | 4,978,600.00 | 10 jenis | | 5,476,460.00 | 10 jenis | | 6,024,106.00 | 10 jenis | 21,005,166.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - | - | 9 jenis | | 46,787,600.00 | 9 jenis | | 51,466,360.00 | 9 jenis | | 56,612,996.00 | 9 jenis | | 62,274,295.60 | 9 jenis | 217,141,251.60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | - | - | - | - | 120 kali | | 423,999,000.00 | 120 kali | | 466,398,900.00 | 120 kali | | 513,038,790.00 | 120 kali | | 564,342,669.00 | 120 kali | 1,967,779,359.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - | - | - | - | 15 kali | | 390,750,000.00 | 15 kali | | 429,825,000.00 | 15 kali | | 472,807,500.00 | 15 kali | | 520,088,250.00 | 15 kali | 1,813,470,750.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peringatan/kegiatan isidentil | Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | - | - | - | - | 2 kali | | 35,190,000.00 | 2 kali | | 38,709,000.00 | 2 kali | | 42,579,900.00 | 2 kali | | 46,837,890.00 | 2 kali | 163,316,790.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | - | - | - | - | 78 kendaraan | | 694,360,000.00 | 78 kendaraan | | 763,796,000.00 | 78 kendaraan | | 840,175,600.00 | 78 kendaraan | | 924,193,160.00 | 78 kendaraan | 3,222,524,760.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan BBM dan pelumas | Jumlah/volume BBM dan Pelumas | - | - | - | - | 25.000 Liter | | 317,340,000.00 | 25.000 Liter | | 349,074,000.00 | 25.000 Liter | | 383,981,400.00 | 25.000 Liter | | 422,379,540.00 | 25.000 Liter | 1,472,774,940.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | - | - | - | - | 100 orang | | 574,510,000.00 | 100 orang | | 631,961,000.00 | 100 orang | | 695,157,100.00 | 100 orang | | 764,672,810.00 | 100 orang | 2,666,300,910.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan | - | - | - | - | 161 dokumen | | 322,270,000.00 | 161 dokumen | | 322,270,000.00 | 161 dokumen | | 322,270,000.00 | 161 dokumen | | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 1,289,080,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | - | - | - | - | 1 dokumen | | 53,690,000.00 | 1 dokumen | | 59,059,000.00 | 1 dokumen | | 64,964,900.00 | 1 dokumen | | 71,461,390.00 | 1 dokumen | 249,175,290.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan zona Intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM ) | Jumlah ZI | - | - | - | - | 12 bln | | 216,380,000.00 | 12 bln | | 238,018,000.00 | 12 bln | | 261,819,800.00 | 12 bln | | 288,001,780.00 | 12 bln | 1,004,219,580.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan | Jumlah sertifikat | - | - | - | - | 1 sertifikat | | 106,630,000.00 | 1 sertifikat | | 117,293,000.00 | 1 sertifikat | | 129,022,300.00 | 1 sertifikat | | 141,924,530.00 | 1 sertifikat | 494,869,830.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Reviw Renstra | Jumlah Dokumen Renstra | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | 222,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen RENJA/RKT | Jumlah Dokumen RENJA/RKT | - | - | - | - | 2 Dokumen | | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | 341,840,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | - | - | - | - | 9 jenis | | 200,000,000.00 | 9 jenis | | 190,210,000.00 | 9 jenis | | 190,210,000.00 | 9 jenis | | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | - | - | - | - | 10 jenis | | 101,700,000 | 10 jenis | | 716,390,000 | 10 jenis | | 716,390,000 | 10 jenis | | 716,390,000 | 10 jenis | 716,390,000 |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD |  |  |  |  |  |  |  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 |  | 0,26 | |  | 0,28 | |  | 0,30 | |  | 0,33 | |  | 0,33 |  |
|  | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah |  |  |  |  |  |  | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | 114.00% | 105.00% | 100% |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program perencanaan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah | % Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | - | - | - | - | 37.04 | | 3,000,000,000.00 | 18.96 | | 3,250,000,000.00 | 14.88 | | 3,500,000,000.00 | 17.23 | | 3,750,000,000.00 | 17.23 | 13,500,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Perencanaan Dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli | - | - | - | - | 24 dokumen | | 847,585,000.00 | 24 dokumen | | 847,585,000.00 | 24 dokumen | | 847,585,000.00 | 24 dokumen | | 847,585,000.00 | 24 dokumen | 3,390,340,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah | - | - | - | - | 740.306.528.700,00 | | 578,045,000.00 | 869.687.339.915,00 | | 283,585,000.00 | 999.083.034.140,25 | | 283,585,000.00 | 1.171.264.370.737,96 | | 283,585,000.00 | 1.171.264.370.737,96 | 1,428,800,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah | Jumlah sistem informasi manajemen PAD yang terintegrasi dan terpelihara | - | - | - | - | 1 sistem | | 1,174,370,000.00 | 1 sistem | | 115,000,000.00 | 1 sistem | | 165,000,000.00 | 1 sistem | | 115,000,000.00 | 1 sistem | 1,569,370,000.00 |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD |  |  |  |  |  |  |  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 |  | 0,26 | |  | 0,28 | |  | 0,30 | |  | 0,33 | |  | 0,33 |  |
|  | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah |  |  |  |  |  |  | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | 114.00% | 105.00% | 100% |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pelayanan Pajak Daerah | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | - | - | - | - | 82.08 | | 4,000,000,000.00 | 82.97 | | 4,500,000,000.00 | 83.44 | | 4,750,000,000.00 | 84.16 | | 5,000,000,000.00 | 84.16 | 18,250,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I | Jumlah data PBB yang dimutakhirkan | - | - | - | - | 7000 data PBB | | 1,465,579,000.00 | 7500 data PBB | | 1,612,136,900.00 | 8000 data PBB | | 1,773,349,690.00 | 8500 data PBB | | 1,950,684,659.00 | 8500 data PBB | 6,801,750,249.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah I | Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan didistribusikan | - | - | - | - | 545.000 | | 2,044,718,000.00 | 548.000 | | 2,044,718,000.00 | 550.000 | | 2,044,718,000.00 | 552.000 | | 2,044,718,000.00 | 552.000) | 8,178,872,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II | - | - | - | - | 3.900 | | 669,443,000.00 | 4.095 | | 736,387,300.00 | 13.210 | | 810,026,030.00 | 4.514 | | 891,028,633.00 | 4.514 | 3,106,884,963.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II | - | - | - | - | 56.100 | | 514,574,000.00 | 58.905 | | 566,031,400.00 | 304.504 | | 622,634,540.00 | 319.256 | | 684,897,994.00 | 319.256 | 2,388,137,934.00 |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD |  |  |  |  |  |  |  | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 |  | 0,26 | |  | 0,28 | |  | 0,30 | |  | 0,33 | |  | 0,33 |  |
|  | Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah |  |  |  |  |  |  | Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah | 114.00% | 105.00% | 100% |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% | |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program Pengendalian Pajak Daerah | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah |  |  |  |  | 1.81 | | 4,000,000,000.00 | 18.70 | | 4,500,000,000.00 | 18.70 | | 4,750,000,000.00 | 18.70 | | 5,000,000,000.00 | 18.70 | 10,422,574,797.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Pajak Daerah | - | - | - | - | 12 dokumen | | 100,230,000.00 | 12 dokumen | | 100,230,000.00 | 12 dokumen | | 100,230,000.00 | 12 dokumen | | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 400,920,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah WP yang terperiksa | - | - | - | - | 1200 | | 585,353,500.00 | 1200 | | 585,353,500.00 | 1200 | | 585,353,500.00 | 1200 | | 585,353,500.00 | 1200 | 2,341,414,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penagihan Piutang Pajak Daerah | Jumlah piutang yang tertagih | - | - | - | - | 3,997,019,750.16 | | 354,597,500.00 | 40,547,733,731.06 | | 354,597,500.00 | 32,965,307,523.35 | | 354,597,500.00 | 26,800,795,016.49 | | 354,597,500.00 | 26,800,795,016.49 | 1,418,390,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyelesaian keberatan dan sengketa pajak Daerah | Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan | - | - | - | - | 900 | | 69,833,800.00 | 900 | | 69,833,800.00 | 900 | | 69,833,800.00 | 900 | | 69,833,800.00 | 900 | 279,335,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah | Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak | - | - | - | - | 23 media | | 1,482,515,597.50 | 23 media | | 1,500,000,000.00 | 23 media | | 1,500,000,000.00 | 23 media | | 1,500,000,000.00 | 23 media | 5,982,515,597.50 |

Tabel 6.1

**Tabel 6.2**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan DaerahKota Malang Tahun 2018-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD |  | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |  |  |
| 2017 | 2018 | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD | - |  | - |  |  |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |
|  | Optimalisasi Penerimaan PAD |  | - |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |  |  |  |  |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  |  |  |
|  |  |  | Program Penungjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 47,522,686,395.00 |  | 48,203,729,175.00 |  | 48,952,876,233.00 |  | 48,952,876,233.00 |  | - |
|  |  |  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Jumlah dokumen Renja/RKT; 2. Jumlah dokumen Renstra; 3. Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat; 4. Jumlah sertifikasi; 5. Jumlah ZI |  |  | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | #REF! | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | #REF! | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 555,355,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 596,792,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 642,372,700.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 642,372,700.00 |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. Jumlah dokumen Renja/RKT; 2. Jumlah dokumen Renstra |  |  | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | #REF! | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | #REF! | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 |  |  |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat; 2. Jumlah sertifikasi; 3. Jumlah ZI |  |  | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 214,800,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 376,700,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 414,370,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 455,807,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 501,387,700.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 501,387,700.00 |  |  |
|  |  |  | Krgiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang tersusun |  |  | 12 jenis dokumen | 268,124,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN |  |  |  |  |  |  | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan |  |  | 12 jenis dokumen | 268,124,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 |  |  |
|  |  |  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah |  |  | 75 unit | 74,990,000.00 | 75 unit | 79,450,000.00 | 75 unit | 87,395,000.00 | 75 unit | 96,134,500.00 | 75 unit | 105,747,950.00 | 75 unit | 105,747,950.00 |  |  |
|  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah |  |  | 75 unit | 74,990,000.00 | 75 unit | 79,450,000.00 | 75 unit | 87,395,000.00 | 75 unit | 96,134,500.00 | 75 unit | 105,747,950.00 | 75 unit | 105,747,950.00 |  |  |
|  |  |  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya |  |  | 4 kegiatan | 494,797,500.00 | 100 orang | 574,510,000.00 | 100 orang | 631,961,000.00 | 100 orang | 695,157,100.00 | 100 orang | 764,672,810.00 | 100 orang | 764,672,810.00 |  |  |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya |  |  | 4 kegiatan | 494,797,500.00 | 100 orang | 574,510,000.00 | 100 orang | 631,961,000.00 | 100 orang | 695,157,100.00 | 100 orang | 764,672,810.00 | 100 orang | 764,672,810.00 |  |  |
|  |  |  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Jumlah alat tulis kantor 3. Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 4. Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Jumlah fasilitas kunjungan tamu 7. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah |  |  | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 987,587,550.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 2,356,923,200.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 2,592,615,520.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 2,851,877,072.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 3,137,064,779.20 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 3,137,064,779.20 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  |  | 10 jenis | 10,000,500.00 | 10 jenis | 4,526,000.00 | 10 jenis | 4,978,600.00 | 10 jenis | 5,476,460.00 | 10 jenis | 6,024,106.00 | 10 jenis | 6,024,106.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor |  |  | 67 jenis | 132,656,950.00 | 67 jenis | 501,677,600.00 | 67 jenis | 551,845,360.00 | 67 jenis | 607,029,896.00 | 67 jenis | 667,732,885.60 | 67 jenis | 667,732,885.60 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor |  |  | 9 kali | 122,150,000.00 | 9 kali | 459,189,000.00 | 9 kali | 505,107,900.00 | 9 kali | 555,618,690.00 | 9 kali | 611,180,559.00 | 9 kali | 611,180,559.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan |  |  | 15 jenis | 95,692,500.00 | 15 jenis | 105,995,000.00 | 15 jenis | 116,594,500.00 | 15 jenis | 128,253,950.00 | 15 jenis | 141,079,345.00 | 15 jenis | 141,079,345.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  |  | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 51,466,360.00 | 9 jenis | 56,612,996.00 | 9 jenis | 62,274,295.60 | 9 jenis | 62,274,295.60 |  |  |
|  |  |  | administrasi umum perangkat daerah | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  |  | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 51,466,360.00 | 9 jenis | 56,612,996.00 | 9 jenis | 62,274,295.60 | 9 jenis | 62,274,295.60 |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah fasilitas kunjungan tamu |  |  | 10 kali | 90,150,000.00 | 10 kali | 423,999,000.00 | 10 kali | 466,398,900.00 | 10 kali | 513,038,790.00 | 10 kali | 564,342,669.00 | 10 kali | 564,342,669.00 |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah |  |  | 10 kali | 490,150,000.00 | 10 kali | 814,749,000.00 | 10 kali | 896,223,900.00 | 10 kali | 985,846,290.00 | 10 kali | 1,084,430,919.00 | 10 kali | 1,084,430,919.00 |  |  |
|  |  |  |  | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia |  |  | 120 kali | 90,150,000.00 | 120 kali | 423,999,000.00 | 120 kali | 466,398,900.00 | 120 kali | 513,038,790.00 | 120 kali | 564,342,669.00 | 120 kali | 564,342,669.00 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah peralatan gedung kantor |  |  | 20 jenis | 1,298,761,125.00 | 10 jenis | 101,700,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor |  |  | 20 jenis | 1,298,761,125.00 | 10 jenis | 101,700,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 2. Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik 3. Luasan ruangan yang dibersihkan |  |  | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 1,701,862,150.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 1,762,101,400.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 1,938,311,540.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 2,132,142,694.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 2,345,356,963.40 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 2,345,356,963.40 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik |  |  | 5000 surat | 201,673,350.00 | 5000 surat | 213,370,000.00 | 5000 Surat | 234,707,000.00 | 5000 surat | 258,177,700.00 | 5000 surat | 283,995,470.00 | 5000 surat | 283,995,470.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik |  |  | 12 bulan | 1,367,600,000.00 | 12 bulan | 1,395,660,000.00 | 12 bulan | 1,535,226,000.00 | 12 bulan | 1,688,748,600.00 | 12 bulan | 1,857,623,460.00 | 12 bulan | 1,857,623,460.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan |  |  | 14 ruang | 132,588,800.00 | 850 m2 | 153,071,400.00 | 850 m2 | 168,378,540.00 | 850 m2 | 185,216,394.00 | 850 m2 | 203,738,033.40 | 850 m2 | 203,738,033.40 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3. Jumlah/volume BBM dan pelumas 4. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara |  |  | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,216,015,000.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,241,613,400.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,335,984,740.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,450,562,214.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,576,597,435.40 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,576,597,435.40 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional; 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 3. Jumlah/volume BBM dan pelumas |  |  | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,016,225,000.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,041,613,400.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,145,774,740.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,260,352,214.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,386,387,435.40 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,386,387,435.40 |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara |  |  | 9 jenis | 199,790,000.00 | 9 jenis | 200,000,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 |  |  |
|  |  |  |  | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara |  |  | 9 jenis | 199,790,000.00 | 9 jenis | 200,000,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 |  |  |
|  |  |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengelolaan pendapatan Daerah | Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola |  |  |  | 12,480,225,550.00 |  | 9,886,844,397.50 | 9 Jenis Pajak Daerah | 8,356,184,800.00 | 9 Jenis Pajak Daerah | 8,656,184,800.00 | 9 Jenis Pajak Daerah | 8,856,184,800.00 | 9 Jenis Pajak Daerah | 8,856,184,800.00 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Daerah |  |  | 4 Dokumen | 27,700,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 |  |  |
|  |  |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang terperiksa dan dilakukan pengawasan |  |  | 28,000,000,000.00 | 1,686,000,000.00 | 1,200.00 | 585,353,500.00 | 1250 yang diperiksa | 585,353,500.00 | 1300 yang diperiksa | 585,353,500.00 | 1350 yang diperiksa | 585,353,500.00 | 1350 yang diperiksa | 585,353,500.00 |  |  |
|  |  |  | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Piutan Pajak Daerah |  |  | 2.085 Surat | 478,000,000.00 | 2085 surat | 354,597,500.00 | 2040 surat | 354,597,500.00 | 2085 WP | 354,597,500.00 | 2085 WP | 354,597,500.00 | 2085 WP | 354,597,500.00 |  |  |
|  |  |  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah keberatan dan sengketa yang terselesaikan/diproses Kegiatan Penagihan Pajak Daerah |  |  | 2.085 Wajib Pajak | 1,154,000,000.00 | 900.00 | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 |  |  |
|  |  |  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi |  |  |  |  | 80.000 wajib pajak | 1,482,515,597.50 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 |  |  |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Daerah |  |  | 24 dokumen | 54,000,000.00 | 24 dokumen | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 |  |  |
|  |  |  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pengembangan Daerah serta Dokumen Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |  |  | 3 Dokumen | 1,162,111,900.00 | 16 dokumen kajian | 578,045,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan pajak Daerah yang Terintergrasi dan Terpelihara |  |  | 3 Aplikasi | 1,066,891,900.00 | 2 Aplikasi | 1,174,370,000.00 | 4 aplikasi | 115,000,000.00 | 4 aplikasi | 165,000,000.00 | 4 aplikasi | 115,000,000.00 | 4 aplikasi | 115,000,000.00 |  |  |
|  |  |  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1. Jumlah Ppengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah I 2. Jumlah pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah II |  |  |  | 6,851,521,750.00 |  | 4,694,314,000.00 | 321508 berkas | 4,500,000,000.00 | 321508 berkas | 4,750,000,000.00 | 321508 berkas | 5,000,000,000.00 | 321508 berkas | 5,000,000,000.00 |  |  |

**Tabel 6.3.**

**Pemetaan Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan DaerahKota Malang**

**Tahun 2018-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran | Program/ Kegiatan 2019 | Program/ Kegiatan 2020-2023 | Indikator | Target | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan PAD | - | - |  |  |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,33 |  |
|  | Optimalisasi Penerimaan PAD | - |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
|  | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  | 83 |  |
|  |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  |  |  |  | 12,452,525,550.00 |  | 9,786,614,397.50 |  | 8,255,954,800.00 |  | 8,555,954,800.00 |  | 8,755,954,800.00 |
|  |  | Pengelolaan pendapatan Daerah |  |  | Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola |  | 12,452,525,550.00 |  | 9,786,614,397.50 |  | 8,255,954,800.00 | Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola | 8,555,954,800.00 | Jenis Pajak Daerah Yang Dikelola | 8,755,954,800.00 |
|  |  |  | Pemeriksaan Pajak Daerah | Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah | Jumlah dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah | 4 Dokumen | 27,700,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 | 12 dokumen | 100,230,000.00 |
|  |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |  |  | Jumlah wajib pajak yang terperiksa dan dilakukan pengawasan | 28,000,000,000.00 | 1,686,000,000.00 | 1,200.00 | 585,353,500.00 | 1250 yang diperiksa | 585,353,500.00 | 1300 yang diperiksa | 585,353,500.00 | 1350 yang diperiksa | 585,353,500.00 |
|  |  |  | Penagihan piutang Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang terperiksa | 28,000,000,000.00 | 1,686,000,000.00 | 1,200.00 | 585,353,500.00 | 1,200.00 | 585,353,500.00 | 1,200.00 | 585,353,500.00 | 1,200.00 | 585,353,500.00 |
|  |  | Penagihan Pajak Daerah |  |  | Jumlah surat pemberitahuan piutang yang ditagihkan | 2.085 Surat | 478,000,000.00 | 2085 surat | 354,597,500.00 | 2040 surat | 354,597,500.00 | 2060 surat | 354,597,500.00 | 2085 surat | 354,597,500.00 |
|  |  |  | Penagihan Piutang Pajak Daerah |  | Jumlah piutang yang tertagih | 1200 WP | 478,000,000.00 | 2.085 Surat | 354,597,500.00 | 2.085 Surat | 354,597,500.00 | 2.085 Surat | 354,597,500.00 | 2.085 Surat | 354,597,500.00 |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penurunan Piutang Pajak Daerah |  |  |  |  |  |  | 2085 WP | 354,597,500.00 | 2085 WP | 354,597,500.00 |
|  |  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah |  |  | Jumlah keberatan dan sengketa yang terselesaikan/diproses Kegiatan Penagihan Pajak Daerah | 2.085 Wajib Pajak | 1,154,000,000.00 | 900.00 | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 | 900 surat | 69,833,800.00 |
|  |  |  | Penyelesaian sengketa/keberatan Pajak Daerah | Penyelesaian keberatan dan sengketa pajak Daerah | Jumlah keberatan dan sengketa pajak daerah yang terselesaikan | 2.085 Wajib Pajak | 1,154,000,000.00 | 900.00 | 69,833,800.00 | 900.00 | 69,833,800.00 | 900.00 | 69,833,800.00 | 900.00 | 69,833,800.00 |
|  |  | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |  |  | Jumlah wajib pajak yang tersosialisasi |  |  | 80.000 wajib pajak | 1,482,515,597.50 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 | 80.000 wajib pajak | 1,500,000,000.00 |
|  |  |  |  | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah | Jumlah Sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak |  |  | 23 media | 1,482,515,597.50 | 23 media | 1,500,000,000.00 | 23 media | 1,500,000,000.00 | 23 media | 1,500,000,000.00 |
|  |  | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |  |  | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Daerah | 24 dokumen | 54,000,000.00 | 24 dokumen | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 | 18 kali | 847,585,000.00 |
|  |  |  | Kajian/analisa potensi pajak daerah | Perencanaan Dan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah | 24 dokumen | 54,000,000.00 | 24 dokumen | 847,585,000.00 | 24 dokumen | 847,585,000.00 | 24 dokumen | 847,585,000.00 | 24 dokumen | 847,585,000.00 |
|  |  | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pengembangan Daerah serta Dokumen Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 3 Dokumen | 1,162,111,900.00 | 16 dokumen kajian | 578,045,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 | 3 dokumen | 283,585,000.00 |
|  |  |  | Kajian pajak daerah | Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah | Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah | 3 Dokumen | 1,162,111,900.00 | 16 dokumen kajian | 578,045,000.00 | 16 dokumen kajian | 283,585,000.00 | 16 dokumen kajian | 283,585,000.00 | 16 dokumen kajian | 283,585,000.00 |
|  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |  |  | Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan pajak Daerah yang Terintergrasi dan Terpelihara | 3 Aplikasi | 1,066,891,900.00 | 2 Aplikasi | 1,174,370,000.00 | 4 aplikasi | 115,000,000.00 | 4 aplikasi | 165,000,000.00 | 4 aplikasi | 115,000,000.00 |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Daerah | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah | Jumlah sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang terintegrasi dan terpelihara | 1 sistem | 689,070,000.00 | 1 sistem | 1,174,370,000.00 | 1 sistem | 115,000,000.00 | 1 sistem | 165,000,000.00 | 1 sistem | 115,000,000.00 |
|  |  |  | Pengembangan sistem informasi manajemen perpajakan daerah |  | Jumlah aplikasi sistem perpajakan daerah yang terintegrasi | 2 Aplikasi | 377,821,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |  |  | 1. Jumlah Ppengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah I 2. Jumlah pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah II |  | 6,851,521,750.00 |  | 4,694,314,000.00 | 321508 berkas | 4,500,000,000.00 | 321508 berkas | 4,750,000,000.00 | 321508 berkas | 5,000,000,000.00 |
|  |  |  | Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I |  | 2 aplikasi | 377,821,900.00 | 7000 data PBB | 1,465,579,000.00 | 7000 data PBB | 1,612,136,900.00 | 7000 data PBB | 1,773,349,690.00 | 7000 data PBB | 1,950,684,659.00 |
|  |  |  | Pendataan dan Pemantauan Obyek dan Wajib Pajak Daerah | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah I |  | 5% | 4,485,120,825.00 | 278000 Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan,278000 Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan | 2,044,718,000.00 | 278000 Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan | 2,044,718,000.00 | 278000 Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan | 2,044,718,000.00 | 278000 Surat Ketetapan Pajak Daerah I yang ditetapkan dan | 2,044,718,000.00 |
|  |  |  | Pendaftaran dan pendistribusian NPWPD | Pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II |  | 340.000 SKPD | 1,202,640,700.00 | 3000 Obyek Pajak | 669,443,000.00 | 3000 Obyek Pajak | 736,387,300.00 | 3000 Obyek Pajak | 810,026,030.00 | 3000 Obyek Pajak | 891,028,633.00 |
|  |  |  | Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak | Penetapan dan pendistribusian Pajak Daerah II |  | 10000 OP | 785,938,325.00 | 56100 Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan da | 514,574,000.00 | 56100 Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan da | 566,031,400.00 | 56100 Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan da | 622,634,540.00 | 56100 Surat Ketetapan Pajak Daerah II yang ditetapkan da | 684,897,994.00 |
|  |  | Program Penungjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Kesekretariatan |  |  | 6,464,225,325.00 |  | 6,956,253,000.00 |  | 47,522,686,395.00 |  | 48,203,729,175.00 |  | 48,952,876,233.00 |
|  |  | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 1. Jumlah dokumen Renja/RKT; 2. Jumlah dokumen Renstra; 3. Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat; 4. Jumlah sertifikasi; 5. Jumlah ZI | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 422,088,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 517,685,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 555,355,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 596,792,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 2 Dokumen; 4. 1 Sertifikat; 5. 50 ZI | 642,372,700.00 |
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 1. Jumlah dokumen Renja/RKT; 2. Jumlah dokumen Renstra | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 207,288,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen | 140,985,000.00 |
|  |  |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |  | " | 5 jenis dokumen | 27,588,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Renstra | Penyusunan Reviw Renstra | Jumlah Dokumen Renstra | 1 Dokumen | 70,000,000.00 | 1 Dokumen | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | 55,525,000.00 | 1 Dokumen | 55,525,000.00 |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen RENJA/RKT | Penyusunan Dokumen RENJA/RKT | Jumlah Dokumen RENJA/RKT | 2 Dokumen | 82,000,000.00 | 2 Dokumen | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | 85,460,000.00 | 2 Dokumen | 85,460,000.00 |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen RKA/DPA dan PRKA/DPPA |  |  | 4 Dokumen | 27,700,000.00 |  |  |  |  |  | , |  |  |
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 1. Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat; 2. Jumlah sertifikasi; 3. Jumlah ZI | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 214,800,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 376,700,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 414,370,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 455,807,000.00 | 1. 2 Dokumen; 2. 1 Sertifikat; 3. 50 ZI | 501,387,700.00 |
|  |  |  | Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 2 dokumen | 41,650,000.00 | 1 dokumen | 53,690,000.00 | 1 dokumen | 59,059,000.00 | 1 dokumen | 64,964,900.00 | 1 dokumen | 71,461,390.00 |
|  |  |  | Pelaksanaan zona Intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih melayani ( WBBM ) | Pelaksanaan zona Intergritas menuju wilayah bebas dari korupsi ( WBK ) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM ) | Jumlah ZI | 75.5 | 73,150,000.00 | 12 bln | 216,380,000.00 | 12 bln | 238,018,000.00 | 12 bln | 261,819,800.00 | 12 bln | 288,001,780.00 |
|  |  |  | Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan | Sertifikasi Standar Mutu Manajemen/Pelayanan | Jumlah sertifikat | 1 sertifikat | 100,000,000.00 | 1 sertifikat | 106,630,000.00 | 1 sertifikat | 117,293,000.00 | 1 sertifikat | 129,022,300.00 | 1 sertifikat | 141,924,530.00 |
|  |  | Krgiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  | Jumlah laporan keuangan yang tersusun | 12 jenis dokumen | 268,124,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 | 161 dokumen | 39,664,673,595.00 |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  |  | Jumlah ASN |  |  |  |  | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 | 75 Pegawai | 39,342,403,595.00 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  | Jumlah laporan keuangan | 12 jenis dokumen | 268,124,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 |
|  |  |  | Penyusunan laporan keuangan | Penyusunan laporan keuangan | Jumlah laporan keuangan yang tersusun | 12 jenis dokumen | 268,124,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 | 161 dokumen | 322,270,000.00 |
|  |  | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |  |  | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 75 unit | 74,990,000.00 | 75 unit | 79,450,000.00 | 75 unit | 87,395,000.00 | 75 unit | 96,134,500.00 | 75 unit | 105,747,950.00 |
|  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  |  | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 75 unit | 74,990,000.00 | 75 unit | 79,450,000.00 | 75 unit | 87,395,000.00 | 75 unit | 96,134,500.00 | 75 unit | 105,747,950.00 |
|  |  |  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah | 75 unit | 74,990,000.00 | 75 unit | 79,450,000.00 | 75 unit | 87,395,000.00 | 75 unit | 96,134,500.00 | 75 unit | 105,747,950.00 |
|  |  | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 4 kegiatan | 494,797,500.00 | 100 orang | 574,510,000.00 | 100 orang | 631,961,000.00 | 100 orang | 695,157,100.00 | 100 orang | 764,672,810.00 |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |  | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 4 kegiatan | 494,797,500.00 | 100 orang | 574,510,000.00 | 100 orang | 631,961,000.00 | 100 orang | 695,157,100.00 | 100 orang | 764,672,810.00 |
|  |  |  | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 4 kegiatan | 494,797,500.00 | 100 orang | 574,510,000.00 | 100 orang | 631,961,000.00 | 100 orang | 695,157,100.00 | 100 orang | 764,672,810.00 |
|  |  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | 1. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Jumlah alat tulis kantor 3. Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 4. Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Jumlah fasilitas kunjungan tamu 7. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 987,587,550.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 2,356,923,200.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 2,592,615,520.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 2,851,877,072.00 | 1. 10 jenis 2. 67 jenis 3. 9 kali 4. 15 jenis 5. 9 jenis 6. 10 kali 7. 10 kali | 3,137,064,779.20 |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10 jenis | 10,000,500.00 | 10 jenis | 4,526,000.00 | 10 jenis | 4,978,600.00 | 10 jenis | 5,476,460.00 | 10 jenis | 6,024,106.00 |
|  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 10 jenis | 10,000,500.00 | 10 jenis | 4,526,000.00 | 10 jenis | 4,978,600.00 | 10 jenis | 5,476,460.00 | 10 jenis | 6,024,106.00 |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | Jumlah alat tulis kantor | 67 jenis | 132,656,950.00 | 67 jenis | 501,677,600.00 | 67 jenis | 551,845,360.00 | 67 jenis | 607,029,896.00 | 67 jenis | 667,732,885.60 |
|  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah alat tulis kantor | 67 jenis | 132,656,950.00 | 67 jenis | 501,677,600.00 | 67 jenis | 551,845,360.00 | 67 jenis | 607,029,896.00 | 67 jenis | 667,732,885.60 |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  |  | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor | 9 kali | 122,150,000.00 | 9 kali | 459,189,000.00 | 9 kali | 505,107,900.00 | 9 kali | 555,618,690.00 | 9 kali | 611,180,559.00 |
|  |  |  | Peringatan/kegiatan isidentil | Peringatan/kegiatan isidentil | Jumlah kegiatan peringatan/kegiatan insidentil | 2 kali | 32,000,000.00 | 2 kali | 35,190,000.00 | 2 kali | 38,709,000.00 | 2 kali | 42,579,900.00 | 2 kali | 46,837,890.00 |
|  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 120 kali | 90,150,000.00 | 120 kali | 423,999,000.00 | 120 kali | 466,398,900.00 | 120 kali | 513,038,790.00 | 120 kali | 564,342,669.00 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis | 95,692,500.00 | 15 jenis | 105,995,000.00 | 15 jenis | 116,594,500.00 | 15 jenis | 128,253,950.00 | 15 jenis | 141,079,345.00 |
|  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 15 jenis | 95,692,500.00 | 15 jenis | 105,995,000.00 | 15 jenis | 116,594,500.00 | 15 jenis | 128,253,950.00 | 15 jenis | 141,079,345.00 |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |  |  | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 51,466,360.00 | 9 jenis | 56,612,996.00 | 9 jenis | 62,274,295.60 |
|  |  | administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 46,787,600.00 | 9 jenis | 51,466,360.00 | 9 jenis | 56,612,996.00 | 9 jenis | 62,274,295.60 |
|  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  | Jumlah fasilitas kunjungan tamu | 10 kali | 90,150,000.00 | 10 kali | 423,999,000.00 | 10 kali | 466,398,900.00 | 10 kali | 513,038,790.00 | 10 kali | 564,342,669.00 |
|  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 120 kali | 90,150,000.00 | 120 kali | 423,999,000.00 | 120 kali | 466,398,900.00 | 120 kali | 513,038,790.00 | 120 kali | 564,342,669.00 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 10 kali | 490,150,000.00 | 10 kali | 814,749,000.00 | 10 kali | 896,223,900.00 | 10 kali | 985,846,290.00 | 10 kali | 1,084,430,919.00 |
|  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 15 kali | 400,000,000.00 | 15 kali | 390,750,000.00 | 15 kali | 429,825,000.00 | 15 kali | 472,807,500.00 | 15 kali | 520,088,250.00 |
|  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 120 kali | 90,150,000.00 | 120 kali | 423,999,000.00 | 120 kali | 466,398,900.00 | 120 kali | 513,038,790.00 | 120 kali | 564,342,669.00 |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  | jumlah peralatan gedung kantor | 20 jenis | 1,298,761,125.00 | 10 jenis | 101,700,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 |
|  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  | Jumlah peralatan gedung kantor | 20 jenis | 1,298,761,125.00 | 10 jenis | 101,700,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 |
|  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | jumlah peralatan gedung kantor | 20 jenis | 1,298,761,125.00 | 10 jenis | 101,700,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 | 10 jenis | 716,390,000.00 |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 1. Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik 2. Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik 3. Luasan ruangan yang dibersihkan | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 1,701,862,150.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 1,762,101,400.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 1,938,311,540.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 2,132,142,694.00 | 1. 5000 surat 2. 12 bulan 3. 850m2 | 2,345,356,963.40 |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 5000 surat | 201,673,350.00 | 5000 surat | 213,370,000.00 | 5000 Surat | 234,707,000.00 | 5000 surat | 258,177,700.00 | 5000 surat | 283,995,470.00 |
|  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 5000 surat | 201,673,350.00 | 5000 surat | 213,370,000.00 | 5000 surat | 234,707,000.00 | 5000 surat | 258,177,700.00 | 5000 surat | 283,995,470.00 |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik | 12 bulan | 1,367,600,000.00 | 12 bulan | 1,395,660,000.00 | 12 bulan | 1,535,226,000.00 | 12 bulan | 1,688,748,600.00 | 12 bulan | 1,857,623,460.00 |
|  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik | 12 bulan | 1,367,600,000.00 | 12 bulan | 1,395,660,000.00 | 12 bulan | 1,535,226,000.00 | 12 bulan | 1,688,748,600.00 | 12 bulan | 1,857,623,460.00 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  | Luasan ruangan yang dibersihkan | 14 ruang | 132,588,800.00 | 850 m2 | 153,071,400.00 | 850 m2 | 168,378,540.00 | 850 m2 | 185,216,394.00 | 850 m2 | 203,738,033.40 |
|  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luas ruangan yang dibersihkan | 14 ruang | 132,588,800.00 | 850 m2 | 153,071,400.00 | 850 m2 | 168,378,540.00 | 850 m2 | 185,216,394.00 | 850 m2 | 203,738,033.40 |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3. Jumlah/volume BBM dan pelumas 4. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,216,015,000.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,241,613,400.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,335,984,740.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,450,562,214.00 | 1. 90 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter 4. 9 jenis | 1,576,597,435.40 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  | 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional; 2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 3. Jumlah/volume BBM dan pelumas | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,016,225,000.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,041,613,400.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,145,774,740.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,260,352,214.00 | 1. 81 Unit 2. 78 Kendaraan 3. 25000 Liter | 1,386,387,435.40 |
|  |  |  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |  | 81 unit | 41,500,000.00 | 81 unit | 29,913,400.00 | 81 unit | 32,904,740.00 | 81 unit | 36,195,214.00 | 81 unit | 39,814,735.40 |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | 78 kendaraan | 676,950,000.00 | 78 kendaraan | 694,360,000.00 | 78 kendaraan | 763,796,000.00 | 78 kendaraan | 840,175,600.00 | 78 kendaraan | 924,193,160.00 |
|  |  |  | Pengadaan BBM dan pelumas | Pengadaan BBM dan pelumas |  | 23.670 liter | 297,775,000.00 | 25.000 Liter | 317,340,000.00 | 25.000 Liter | 349,074,000.00 | 25.000 Liter | 383,981,400.00 | 25.000 Liter | 422,379,540.00 |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 9 jenis | 199,790,000.00 | 9 jenis | 200,000,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 |
|  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 9 jenis | 199,790,000.00 | 9 jenis | 200,000,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 | 9 jenis | 190,210,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BAB VII  
KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun kedepan sejak tahun 2018-2023 badan pendapatan daerah Kota Malang mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah di sesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

* 1. Indikator Tujuan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah | - | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,33 |

* 1. Indikator Sasaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase capaian PAD | 114.00% | 105.00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Nilai SAKIP | 84.38 | 84.87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | INDIKATOR | KONDISI AWAL KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | KONDISI AKHIR |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | - | - | - | 37.04% | 18.96% | 14.88% | 17.23% | 17.23% |
| 2 | Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah | 70.54% | 79.51% | 80.54% | 82.08% | 82.97% | 83.44% | 84.16% | 84.16% |
| 3 | Prosentase Penurunan Piutang Pajak Daerah | -13.50% | -9.69% | 1.81% | 1.81% | 18.70% | 23.83% | 26.21% | 26.21% |
| 4 | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang urusan penunjang pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kota Malang yang telah di spesifikasikan dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Sasaran, program,kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Malang. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Perubahan Renstra Badan pendapatan Daerah ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah. Karena itu, Perubahan Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA Badan Pendapatan Daerah serta di gunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Malang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang telah di jabarkan dalam Renja dan RKA, harus di tingkatkan. Hasil pengandalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut di susun laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah. Laporan Kinerja Pemerintah itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Malang, Januari 2021